



Catatan Atas Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2024



: @dikbudntb

DIKBUD

media
creative

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan belanja sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai lampiran I PSAP No.01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit -LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang

- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

- a. Pendapatan -LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
- d. Pos luar biasa bila ada
- e. Surplus/defisit-LO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos ;

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya
 - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari peersediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya.
 - 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal- hal sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekiutas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : (2-68/2022, Tambahan Lembar Daerah Provinsi NTB Nomor 189);
20. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024;
21. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 47);
22. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 103);

23. Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024;

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

3.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

- 3.1.1 Pendapatan-LRA
 - 3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah
 - 3.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Yang Sah
- 3.1.2 Belanja
 - 3.1.2.1 Belanja Operasi
 - 3.1.2.2 Belanja Modal
- 3.1.3 SiLPA

3.2 Penjelasan Atas Pos-pos Neraca

- 3.2.1 Aset Lancar
 - 3.2.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran
 - 3.2.1.2 Kas Di Bendahara Penerimaan
 - 3.2.1.3 Piutang Pajak
 - 3.2.1.4 Piutang Retribusi
 - 3.2.1.5 Piutang Lainnya
 - 3.2.1.6 Penyisihan Piutang
 - 3.2.1.7 Beban dibayar dimuka
 - 3.2.1.8 Persediaan
- 3.2.2 Investasi Jangka Panjang
 - 3.2.2.1 Non Permanen
 - 3.2.2.2 Permanen

- 3.2.3 Aset Tetap
 - 3.2.3.1 Tanah
 - 3.2.3.2 Peralatan dan Mesin
 - 3.2.3.3 Gedung dan Bangunan
 - 3.2.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 3.2.3.5 Aset Tetap Lainnya
 - 3.2.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 3.2.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- 3.2.4 Aset Lainnya
 - 3.2.4.1 Aset Tak Berwujud
 - 3.2.4.2 Aset lain-lains
 - 3.2.4.3 Amortissi
 - 3.2.3.8 Kewajiban
 - 3.2.5.1 Utang PFK
 - 3.2.5.2 Pendapatan Diterima Di Muka
 - 3.2.5.3 Utang Beban
- 3.2.5 Ekuitas
- 3.3 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
 - 3.3.1 Kegiatan Operasional
 - 3.3.1.1 Pendapatan LO
 - 3.3.1.2 Beban
 - 3.3.2 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
 - 3.3.2.1 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operational
 - 3.3.3 Pos Luar Biasa
 - 3.3.3.1 Beban Luar Biasa
 - 3.3.3 Surplus/Defisit LO
- 3.4 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 3.4.1 Ekuitas awal/ekuitas tahun sebelumnya
 - 3.4.2 Surplus/Defisit LO
 - 3.4.3 Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 3.4.4 Ekuitas Akhir

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA –SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB** sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98,52	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95,87	100
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99,71	100
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78,17	100
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,16	100
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,20	100

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Anggaran sebesar Rp 1.260.711.408.079 dan realisasi sebesar Rp. 1.241.733.607.780, dan persentase realisasi keuangan sebesar 98,44% dan persentase realisasi fisik sebesar Rp. 98,01 persen

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	89,88	89,89
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	93,15	93,17
3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	94,87	95,03

Pada Program Pengelolaan Pendidikan meliputi kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pengelolaan

Pendidikan Khusus dengan anggaran Rp. 558.554.966.123 dan realisasi sebesar Rp. 511.375.005.263, dan persentase realisasi keuangan sebesar 91.55% dan persentase realisasi fisik sebesar Rp. 91,57 persen, pada Program Pendidikan realisasi fisik maupun keuangan tidak diangka 100% karena masih banyaknya belanja DAK fisik yang belum terealisasi dan diakui sebagai utang yang harus diselesaikan pada tahun 2025.

3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	84,31	100

Pada Program Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dengan anggaran Rp. 49.572.530.800 dan realisasi sebesar Rp. 41.793628.417, dan persentase realisasi keuangan sebesar 84,31% dan persentase realisasi fisik sebesar Rp. 100 persen

4. PRORGAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	88,84	100
2	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	96,02	100

5. PRORGAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	88,84	100
2	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	96,02	100
3	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	81,95	100
4	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	98,30	100

6. PROGRAM DI TAMAN BUDAYA

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47,18	47,18
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100
3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	100
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,48	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,41	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	100

	Pemerintahan Daerah		
8	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	79,77	80
9	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	99,88	100

7. PROGRAM DI MUSEUM

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48,59	49
	Administrasi keuangan prangkat daerah	98,49	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	97,85	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94,62	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100
	Pengelolaan Museum Provinsi	98,18	100

8. PROGRAM DI CABANG DINAS LOMBOK BARAT DAN MATARAM

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,19	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98,82	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	57,09	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96,41	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96,40	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,26	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,21	100
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	87,21	100
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	68,37	100
10	Pengelolaan Pendidikan Khusus	92,63	100

9. PROGRAM DI CABANG DINAS LOMBOK TENGAH

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79,32	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85,84	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	69,75	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99,01	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93,01	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93,87	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	74,32	100
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	99,99	100
10	Pengelolaan Pendidikan Khusus	91,85	100

10. PROGRAM DI CABANG DINAS LOMBOK TIMUR

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,97	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53,12	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	71,80	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83,54	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93,26	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,59	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,07	100
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	97,08	100
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	99,70	100
10	Pengelolaan Pendidikan Khusus	92,63	100

11. PROGRAM DI CABANG DINAS LOMBOK UTARA

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63,31	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66,27	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	63,63	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58,00	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88,39	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94,10	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,49	100
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	91,10	100
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	89,74	100
10	Pengelolaan Pendidikan Khusus	99,00	100

12. PROGRAM DI CABANG DINAS SUMBAWA BARAT

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45,08	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76,95	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76,35	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,59	100
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	94,25	100
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100	100
10	Pengelolaan Pendidikan Khusus	100	100

13. PROGRAM DI CABANG DINAS SUMBAWA

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,19	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98,82	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	57,09	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96,41	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96,40	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,26	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,21	100
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	87,21	100
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	68,37	100
10	Pengelolaan Pendidikan Khusus	92,63	100

14. PROGRAM DI CABANG DINAS DOMPU

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,19	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98,82	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	57,09	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96,41	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96,40	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,26	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,21	100
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	87,21	100
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	68,37	100
10	Pengelolaan Pendidikan Khusus	92,63	100

15. PROGRAM DI CABANG DINAS BIMA

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,19	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98,82	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	57,09	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96,41	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96,40	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,26	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,21	100
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	87,21	100
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	68,37	100
10	Pengelolaan Pendidikan Khusus	92,63	100

2.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Adapun beberapa hambatan yang mengakibatkan tidak tercapainya realisasi 100 % antara lain:

1. Keterlambatan Persiapan Pelaksanaan: Beberapa kegiatan membutuhkan persiapan lebih lanjut, seperti persiapan lahan yang jika belum selesai akan menghambat pelaksanaan kegiatan dan belanja
2. Gagal Lelang: Proses lelang yang berulang kali gagal atau harus diulang dapat menunda realisasi belanja dan penyerapan anggaran
3. Perencanaan yang Kurang Tepat: Perencanaan yang memakan waktu lama dan kurang matang dapat menyebabkan keterlambatan

2.3. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PER SUMBER DANA.

2.3.1. REALISASI PENGGUNAAN DANA PENDAPATAN ASLI DAERAH

NOMOR KODE PROGRAM/KEGIATAN/ KODE REKENING	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN			SISA ANGGARAN
			S/D BULAN INI			
			(Rp)	KEU %	FISIK %	
1	2	3	11	12,00	13,00	14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (SEKTRETARIAT)	1.275.601.223.337	1.255.712.454.953	98,44	99,93	19.888.768.384
5.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.822.400	159.822.400	100,00	100,00	-
5.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.163.400	70.163.400	100,00	100,00	-
5.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	48.670.000	48.670.000	100,00	100,00	-
5.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.240.000	16.240.000	100,00	100,00	-
5.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	0	0,00	-	-
5.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	0	0,00	-	-
5.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.374.500	12.374.500	100,00	100,00	-
5.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.374.500	12.374.500	100,00	100,00	-
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.256.609.492.039	1.238.035.542.895	98,52	100,00	18.573.949.144
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.256.158.812.639	1.237.597.835.605	99,32	100,00	18.560.977.034
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	450.679.400	437.707.290	97,12	100,00	12.972.110
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	-
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	-	-

1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	-
1.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	170.160.000	163.133.610	95,87	100,00	7.026.390
1.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	0	0,00	-	0
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	95.160.000	94.353.610	99,15	100,00	806.390
1.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000.000	68.780.000	91,71	100,00	6.220.000
			0	0,00	-	0
1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
1.01.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
1.01.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	204.319.300	203.735.370	99,71	100,00	583.930
1.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	160.654.000	160.295.070	99,78	100,00	358.930
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	43.665.300	43.440.300	99,48	100,00	225.000
1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	-
1.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	627.009.500	546.885.841	78,17	100,00	80.123.659
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	0	0,00	-	0
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	0	0,00	-	0
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.684.100	55.109.100	92,33	100,00	4.575.000
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	0	0,00	-	0
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		8.990.000	97,29	100,00	250.000

	undangan	9.240.000				
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	-	0	0,00	-	0
1.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	21.000.000	20.216.067	96,27	100,00	783.933
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	402.085.400	328.436.074	81,68	100,00	73.649.326
1.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	135.000.000	134.134.600	99,36	100,00	865.400
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	-	0	0,00	-	0
5.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-
5.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.634.104.840	2.322.732.828	81,16	100,00	311.372.012
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	515.450.000	492.514.348	95,55	100,00	22.935.652
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.118.654.840	1.830.218.480	86,39	100,00	288.436.360
5.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.500.000	301.754.836	97,20	100,00	4.745.164
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	291.500.000	286.769.836	98,38	100,00	4.730.164
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0	0,00	-	0
1.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	15.000.000	14.985.000	99,90	100,00	15.000
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	0	0,00	-	0
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	14.889.815.258	13.978.847.173	93,88	93,88	910.968.085
1.01.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	14.889.815.258	13.978.847.173	93,88	93,88	910.968.085
	SMKN 3 MATARAM	2.732.423.133	2.749.214.285	100,61	100,61	-16.791.152

	SMKN 5 MATARAM	1.248.812.785	1.400.362.159	112,14	112,14	-151.549.374
	SMKN 2 KURIPAN	1.019.779.000	910.404.350	89,27	89,27	109.374.650
	SMKN 1 LINGSAR	956.716.893	623.069.500	65,13	65,13	333.647.393
	SMKN 1 PRAYA	2.298.870.158	2.537.367.964	110,37	110,37	-238.497.806
	SMKN 1 SELONG	2.252.897.194	2.247.600.000	99,76	99,76	5.297.194
	SMKN 1 TALIWANG	1.040.921.886	637.588.625	61,25	61,25	403.333.261
	SMKN 2 SUMBAWA	1.601.785.400	1.529.493.940	95,49	95,49	72.291.460
	SMKN1 DOMPU	910.569.409	745.174.350	81,84	81,84	165.395.059
	SMKN 1 DONGGO	150.480.000	145.000.000	96,36	96,36	5.480.000
	SMKN 1 KOBİ	676.559.400	453.572.000	67,04	67,04	222.987.400
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	200.000.000	60.730.000	30,37	100,00	139.270.000
1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Satu) Daerah Provinsi	200.000.000	60.730.000	30,37	100,00	139.270.000
1.01.06.1.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	200.000.000	60.730.000	30,37	100,00	139.270.000
2.22.2	BIDANG KEBUDAYAAN	2.571.500.000	2.318.680.657	90,17	99,68	252.819.343
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.158.000.000	1.914.596.500	88,72	100,00	243.403.500
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000	199.512.227	99,76	100,00	487.773
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	-	0	0,00	-	0
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	200.000.000,00	199.512.227	99,76	100,00	487.773
2.22.3.02.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.958.000.000	1.715.084.273	88,97	100,00	242.915.727
2.22.03.1.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1.958.000.000	1.715.084.273	87,59	100,00	242.915.727
2.22.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	100.440.250	100.375.850	99,94	100,00	64.400
2.22.3.03.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.440.250	100.375.850	99,94	100,00	64.400
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional (4%)	100.440.250	100.375.850	81	81,07	64.400
2.22.4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	163.059.750	154.898.307	94,99	94,99	8.161.443

2.22.4.02.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	163.059.750	154.898.307	94,99	94,99	8.161.443
2.22.04.1.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi (5%)	163.059.750	154.898.307	94,99	94,99	8.161.443
2.22.5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	150.000.000	148.810.000	99,21	100,00	1.190.000
2.22.5.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	82.400.000	81.830.000	72,55	100,00	570.000
2.22.5.01.00.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	36.900.000	36.900.000	100,00	100,00	0
2.22.5.01.00.02	Pelindungan Cagar Budaya	45.500.000	44.930.000	98,75	100,00	570.000
2.22.5.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	67.600.000	66.980.000	99,08	100,00	620.000
2.22.5.02.00.01	Perlindungan Cagar Budaya	22.000.000	21.380.000	97,18	100,00	620.000
2.22.5.02.00.02	Pengembangan Cagar Budaya	45.600.000	45.600.000	100,00	100,00	0
	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	389.498.000	368.755.220	94,67	100,00	20.742.780
	TAMAN BUDAYA	3.277.956.600	3.201.466.449	97,67	100,00	76.490.151
	MUSEUM NEGERI	2.984.048.000	2.980.292.792	99,87	100,00	3.755.208
	CABANG DINAS LOMBOK BARAT MATARAM	447.222.500	442.823.946	99,02	100,00	4.398.554
	CABANG DINAS LOMBOK TENGAH	606.030.800	586.109.506	96,71	100,00	19.921.294
	CABANG DINAS LOMBOK TIMUR	666.633.600	638.458.113	95,77	100,00	28.175.487
	CABANG DINAS LOMBOK UTARA	418.959.000	387.549.260	92,50	100,00	31.409.740
	CABANG DINAS SUMBAWA BARAT	340.765.200	316.841.750	92,98	100,00	23.923.450
	CABANG DINAS SUMBAWA	616.829.000	615.091.150	99,72	100,00	1.737.850
	CABANG DINAS DOMPU	351.064.400	342.591.284	97,59	100,00	8.473.116
	CABANG DINAS BIMA	676.559.400	639.312.766	94,49	100,00	37.246.634

2.3.2. REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

NOMOR KODE PROGRAM/KEGIATAN/ KODE REKENING	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN			SISA ANGGARAN
			S/D BULAN INI			
			(Rp)	KEU %	FISIK %	
1	2	3	11	12,00	13,00	14
1.01.02.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	558.554.966.123	511.375.005.263	91,55	91,57	47.179.960.860
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	286.787.939.510	257.779.028.995	89,88	89,89	29.008.910.515
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	286.787.939.510	257.779.028.995	89,88	89,89	29.008.910.515
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	7.265.307.695	4.471.778.447	61,55	61,55	2.793.529.248
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.967.082.020	1.553.261.965	78,96	78,96	413.820.055
1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	123.092.180	123.079.180	100,0	100,0	13.000
1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah	63.977.650	61.980.100	96,88	100,00	1.997.550
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.612.145.826	4.055.115.248	72,26	72,26	1.557.030.578
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	26.308.874.015	17.654.130.389	67,10	67,10	8.654.743.626
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4.625.786.140	3.081.457.980	66,61	66,61	1.544.328.160
1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	1.272.318.440	758.554.898	59,62	59,62	513.763.542
1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	1.024.745.950	703.055.638	68,61	68,61	321.690.312
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	296.782.320	238.290.396	80,29	80,29	58.491.924
1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	543.330	0	0,00	-	543.330

1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	328.912.560	181.237.355	55,10	55,10	147.675.205
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.355.091.310	836.991.013	61,77	61,77	518.100.297
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	4.719.750.000	4.719.238.549	99,99	99,99	511.451
1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	300.000.000	300.000.000	100,00	100,00	0
1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3.241.027.000	2.810.943.600	86,73	86,73	430.083.400
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	50.000.000	47.239.100	94,48	100,00	2.760.900
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	460.037.500	282.478.972	61,40	61,40	177.558.528
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	50.000.000	49.930.000	99,86	100,00	70.000
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	189.176.400.000	189.176.400.000	100,00	100,00	0
1.01.02.1.01.60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	630.060.000	616.555.810	97,86	100,00	13.504.190
1.01.02.1.01.65	Pemberian Layanan Pendamping Bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, kekerasan dan Intoleransi	50.000.000	49.940.000	99,88	100,00	60.000
1.01.02.1.01.67	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	36.475.700	35.567.700	97,51	100,00	908.000
1.01.02.1.01.68	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.258.167.670	917.970.285	72,96	72,96	340.197.385
1.01.02.1.01.70	Pembangunan Ruang Laboratorium	12.585.785.276	8.103.164.443	64,38	64,38	4.482.620.833
1.01.02.1.01.71	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	2.596.945.910	1.644.912.474	63,34	63,34	952.033.436
1.01.02.1.01.72	Pembangunan Ruang Kelas Baru	21.288.631.018	15.205.755.453	71,43	71,43	6.082.875.565
1.01.02.1.01.75	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00	0
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	245.382.355.499	228.564.257.739	93,15	93,17	16.818.097.760
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	34.724.512.402	28.718.850.328	82,70	82,70	6.005.662.074

1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	10.082.692.237	8.632.039.777	85,61	85,61	1.450.652.460
1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.910.000.000	1.556.279.344	81,48	81,48	353.720.656
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	697.417.710	688.870.300	98,77	98,77	8.547.410
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.737.793.518	3.884.510.972	81,99	81,99	853.282.546
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	6.956.200.000	6.842.925.934	98,37	98,37	113.274.066
1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	300.000.000	296.440.000	98,81	100,00	3.560.000
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	46.309.443.894	40.324.409.719	87,08	87,08	5.985.034.175
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	60.000.000	56.612.050	94,35	100,00	3.387.950
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	50.000.000	46.980.000	93,96	100,00	3.020.000
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	459.972.500	262.767.168	57,13	57,13	197.205.332
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	290.000.000	235.320.000	81,14	100,00	54.680.000
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	129.997.540.000	129.997.540.000	100,00	100,00	0
1.01.02.1.02.53	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	225.000.000	222.290.000	98,80	100,00	2.710.000
1.01.02.1.02.56	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Pendidik SMK	-	0	0,00	-	0
1.01.02.1.02.60	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Peserta Didik SMK	-	0	0,00	-	0
1.01.02.1.02.61	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	127.227.000	46.770.000	36,76	36,76	80.457.000
1.01.02.1.01.62	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	80.000.000	70.745.000	88,43	100,00	9.255.000
1.01.02.1.01.64	Pembangunan Ruang Kelas Baru	7.447.606.080	5.989.288.660	80,42	80,42	1.458.317.420
1.01.02.1.01.69	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	801.950.158	593.295.067	73,98	73,98	208.655.091

1.01.02.1.01.73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	125.000.000	98.323.420	78,66	100,00	26.676.580
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	26.384.671.114	25.031.718.529	94,87	95,03	1.352.952.585
1.01.02.1.03.03	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	99.684.000	99.684.000	100,00	100,00	0
1.01.02.1.03.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	87.690.370	64.550.340	73,61	73,61	23.140.030
1.01.02.1.03.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	353.897.437	301.965.537	85,33	85,33	51.931.900
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana , Prasarana dan Utilitas Sekolah	368.574.000	160.481.207	43,54	43,54	208.092.793
1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	1.766.756.700	1.425.833.939	80,70	80,70	340.922.761
1.01.02.1.03.12	Pembangunan Ruang Laboratorium	473.692.632	323.476.940	68,29	68,29	150.215.692
1.01.02.1.03.15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	444.424.627	321.946.908	72,44	72,44	122.477.719
1.01.02.1.03.32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita ©	-	0	0,00	-	0
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	697.715.000	693.845.000	99,45	100,00	3.870.000
1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	150.000.000	149.320.000	99,55	100,00	680.000
1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	758.345.300	635.632.800	83,82	83,82	122.712.500
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	1.460.000.000	1.459.721.700	99,98	100,00	278.300
1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	50.000.000	32.615.000	65,23	100,00	17.385.000
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	86.900.000	85.510.000	98,40	100,00	1.390.000
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	50.000.000	49.680.000	99,36	100,00	320.000
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	17.411.000.000	17.411.000.000	100,00	100,00	0
1.01.02.1.03.59	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000	99.920.000	99,92	100,00	80.000

1.01.02.1.03.60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	125.000.000	124.470.700	99,58	100,00	529.300
1.01.02.1.03.66	Pemberiann Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi	25.000.000	24.940.000	99,76	100,00	60.000
1.01.02.1.03.67	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	64.069.400	59.898.000	93,49	100,00	4.171.400
1.01.02.1.03.69	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utiitas Sekolah	194.287.160	161.278.660	83,01	83,01	33.008.500
1.01.02.1.03.70	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.119.834.000	859.700.648	76,77	76,77	260.133.352
1.01.02.1.03.73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	3.100.000	3.100.000	100,00	100,00	0
1.01.02.1.03.77	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	58.664.288	58.469.200	99,67	100,00	195.088
1.01.02.1.03.79	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	315.383.800	315.161.000	99,93	100,00	222.800
1.01.02.1.03.80	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	120.652.400	109.516.950	90,77	100,00	11.135.450
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	49.572.530.800	41.793.628.417	84,31	100,00	7.778.902.383
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	49.572.530.800	41.793.628.417	84,31	100,00	7.778.902.383
1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	49.489.150.000	46.414.335.417	47,42	100,00	3.074.814.583
1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	83.380.800	60.300.000	32,68	100,00	23.080.800

2.3.3. REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM SPM PENDIDIKAN

NOMOR KODE PROGRAM/KEGIATAN/ KODE REKENING	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN			SISA ANGGARAN
			S/D BULAN INI			
			(Rp)	KEU %	FISIK %	
1	2	3	11	12,00	13,00	14
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	49.572.530.800	41.793.628.417	84,31	100,00	7.778.902.383
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	49.572.530.800	41.793.628.417	84,31	100,00	7.778.902.383
1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	49.489.150.000	46.414.335.417	47,42	100,00	3.074.814.583
1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	83.380.800	60.300.000	32,68	100,00	23.080.800
1.1.5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	50.500.000	49.030.100	0,00	33,12	1.469.900
5.2.21	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	40.000.000	39.280.000	2,5	2,50	720.000
5.2.21.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	40.000.000	39.280.000	98,20	100,00	720.000
5.2.22	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.500.000	9.750.100	0,00	-	10.500.000
1.01.05.1.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	0	0,00	-	0
1.01.05.1.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.500.000	9.750.100	92,86	100,00	749.900
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	200.000.000	60.730.000	30,37	100,00	139.270.000
1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000	60.730.000	30,37	100,00	139.270.000
1.01.06.1.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	200.000.000	60.730.000	30,37	100,00	139.270.000

